

**UPAYA PEMERINTAH DESA MENDORONG PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
OLUHUTA KECAMATAN ATINGGOLA
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Oleh:

**RIYANTI SAMAUN
NIM : S.2117064**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2021

HALAMAN PENGESAHAN
UPAYA PEMERINTAH DESA MENDORONG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN DESA OLUHUTA KECAMATAN
ATINGGOLA KABUPATEN GORONTALO UTARA

Oleh

RIYANTI SAMAUN
S2117064

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana
dan telah disetujui oleh tim pembimbing.

Gorontalo, 2021

PEMBIMBING I


Dr. Bala Bakri, S.ip., S.E., Psi., MM
NIDN : 0002057502

PEMBIMBING II


Achmad Risa Mediansyah, S.Sos., M.Si
NIDN : 0923079004

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



HALAMAN PERSETUJUAN

UPAYA PEMERINTAH DESA MENDORONG PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA OLUHUTA
KECAMATAN ATINGGOLA KABUPATEN GORONTALO
UTARA

Oleh

RIYANTI SAMAUN

S2117064

Telah Di pertahankan Di Depan Penguji

Pada Tanggal..... 2021

Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

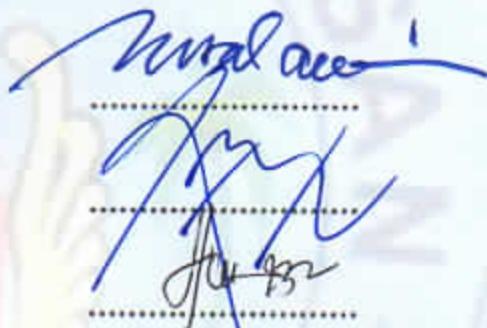
1. Dr. Moch. Sakir S.Sos,S.I.Pem,M.Si

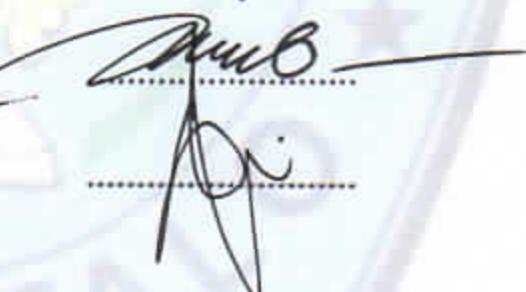
2. Dr. Fatmah, M, Ngabito, M.Si

3. Swastuani Dunggio, S.IP., M.Si

4. Dr. Bala Bakri, S.IP.,S.E.,S.Psi.,MM

5. Achmad Risa Mediansyah, S.Sos.,M.Si





Mengetahui:

Dekan Fakultas
Ilmu sosial dan ilmu politik



Achmad Risa Mediansyah, S.Sos.,M.Si
NIDN. 0913076602

Ketua Program
Studi Ilmu Pemerintahan



Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP
NIDN. 0924076701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya(Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karyatulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya ataupun dapat yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karna karya tulis, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 13 Maret 2021
Yang membuat pernyataan



Riyanti Samaun
NIM :S2117064

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dianiatkan.

Jika kita jujur pada proses, takdir pun adil pada hidup kita. Hal yang baik selalu datang di akhir, dengan penuh perjuangan dan kesabaran.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk Ayah dan ibuku tercinta yang tak pernah luput mendoakan dan memberikan semangat maupun materi. Serta saudara kandung saya yang selalu memberikan motivasi. Serta seluruh teman saya yang selalu melewati susah senang bersama selama di perantauan (RiyantiSamaun).

ABSTRACT

RIYANTI SAMAUN. S2117064. THE EFFORTS OF THE VILLAGE GOVERNMENT TO ENHANCE COMMUNITY PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT OF OLUHUTA VILLAGE AT ATINGGOLA SUBDISTRICT IN NORTH GORONTALO DISTRICT

This study aims to find out the village government efforts to encourage community participation in the development of Oluhuta Village at AtinggolaSubdistrict in North Gorontalo District and to investigate the supporting and inhibiting factors of the village government efforts to encourage community participation in the development of Oluhuta Village at AtinggolaSubdistrict in North Gorontalo District. This study uses a qualitative method. The data collection employs observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses data collection, data reduction, data display, and conclusions. The results of this study indicate that the efforts of the village government to encourage community participation in village development are: 1) providing guidance to the community regarding environmental concern by keeping the environment clean from rubbish, 2) building community capacity in developing cattle production from the village government, and 3) fostering the decision-making process through village meetings. The supporting and inhibiting factors to the efforts of the village government to encourage community participation in village development, namely: 1) the supporting factors to the efforts of the village government to encourage community participation in village development are namely the openness and the commitment of the village government in involving the community in the development and the attitude of community cooperation in the development activities, and the level of relatively high community education, 2) the inhibiting factors to the efforts of the village government to encourage community participation in the development of the village come from the government itself, which is not capable of accounting for reporting the use of village finances so that village development financing is obstructed, and the ignorance attitude of the community in viewing the village development is not important, so in the implementation of development in Oluhuta Village most of the community does not participate in the development.

Keywords: government efforts, community participation, village development

ABSTRAK

RIYANTI SAMAUN.S2117064. UPAYA PEMERINTAH DESA MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA OLUHUTA KECAMATAN ATINGGOLA KABUPATEN GORONTALO UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu: 1) melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang kepedulian terhadap lingkungan dengan menjaga lingkungan tetap bersih dari sampah, 2) pembinaan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha ternak sapi dari pemerintah desa, dan 3) pembinaan proses pengambilan keputusan melalui musyawarah desa. Faktor pendukung dan penghambat upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu: 1) faktor pendukung upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yakni sikap keterbukaan dan komitmen pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat dalam pembangunan serta sikap gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan, dan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif tinggi, 2) yang menjadi penghambat dalam upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat untuk membangun desa berasal dari pemerintah sendiri yang kurang cakap dalam pembukuan pelaporan penggunaan keuangan desa sehingga terhambatnya pembiayaan pembangunan desa, dan sikap masyarakat yang bersikap masa bodoh yang memandang pelaksanaan pembangunan desa merupakan hal yang tidak penting, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Oluhuta sebagian besar masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut.

Kata kunci: upaya pemerintah, partisipasi masyarakat, pembangunan desa

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur yang mendalam, saya panjatkan segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan Rahmat dan hidayahNya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi dengan judul **”UPAYA PEMERINTAH DESA MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAGUNAN DESA OLUHITA KECAMATAN ATINGGOLA KABUPATEN GORONTALO UTARA”** ini saya susun dengan tujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian Sarjana di Jurusan Ilmu Pemerintahan S1 Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam usulamn penilitian ini adalah hasil karya yang masih sangat sederhana. Namun, penulis persembahkan kehadapan para pembaca yang budiman, semoga setelah menelaah isinya berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif guna penyempurnaan usulan penelitian ini. Oleh larena itu penulis menyampaikan ucapan trimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku, ibunda Maesa Ahmad dan ayahanda Samsudin Samaun atas segala dukungan do'a dan moril dan material.
2. Bapak Muhamad Ichsan Gaffar,, SE.,M.Ak, selaku ketua Yayasan Pengembangan ILmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. A.Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.

4. Bapak Dr. Arman, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Ibu Darmawaty Abd. Razak, S.Ip., M.Ap. sealaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Dr. Bala Bakri, S.IP.,S.E.,S.Psi.,MM Selaku Dosen Pembimbing I
7. Bapak Achmad Risa Mediansyah, S.Sos.,M.Si Selaku Dosen Pembimbing II
8. Ibu Sandy Prahara ST., M.Si Selaku Pembimbing Akademik
9. Seluruh Staf Dosen Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan yang telah banyak membantu memberikan ilmu serta memotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Teman teman Seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjasdi petunjuk kearah masa depan yang leih baik.

Gorontalo,13 Maret 2021

Riyanti Samaun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
MOTO DAN PERSEMPAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Upaya	9
2.1.1 Pengertian Upaya	9
2.2 Pemerintah Desa	10
2.2.1 Pengertian Pemerintah	10
2.2.2 Pengertian Desa	10
2.2.3 Pengertian Pemerintah Desa	11
2.2.4 Struktur Pemerintah Desa	13
2.2.5 Peran Perangkat Desa	17
2.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.....	19
2.3.1 Pembangunan Desa.....	19
2.4 Konsep Pembangunan Desa.....	23
2.4.1 Pembangunan Desa.....	23
2.5 Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat	26
2.5.1 Pembinaan Kepada Masyarakat	26

2.5.2 Pelibatan Masyarakat Dalam Pembangunan	27
2.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat	29
2.6.1 Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat.....	29
2.6.2 Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat	30
2.7 Kerangka Fikir	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.3 Fokus Penelitian.....	34
3.4 Sumber Data.....	35
3.5 Informan Penelitian.....	35
3.6 Pengumpulan Data	36
3.7 Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Hasil Penelitian	39
4.2 Pembahasan	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.7 Kerangka Pemikiran	31
Tabel 1.1 Data Perangkat Desa Oluhuta.....	42
Tabel 1.2 Data Lembaga BPD	42
Tabel 1.3 Data Lembaga LPM	43
Tabel 1.4 Data Lembaga PKK.....	43
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Desa Oluhuta Menurut Jenis Kelamin.....	44
Tabel 1.6 Data Penduduk Desa Olihuta	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara	67
Lampiran 2 Dokumentasi Penilitian.....	69
Lampiran 3 Surat Ijin Penilitian	76
Lampiran 4 Surat Keterangan Penilitian	77
Lampiran 5 Surat Rekomendasi Bebas Plagiat	78
Lampiran 6 Abstrak.....	79
Lampiran 7 Hasil Uji Turnitin	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan desa harus semakin menantang di masa depan dengan keadaan perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Namun, desa sampai sekarang masih belum berpindah dari profil lama yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak menerima bahwa desa memiliki peranan yang besar untuk kota, namun tetap saja desa dianggap rendah dalam hal ekonomi ataupun hal yang lainnya. Meskipunkita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesiamendiamidaerah pedesaan dan bekerja sebagai petani dan nelayan. Oleh karena itu, sudah sepantasnyabilapembangunanpedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segala rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. (Hernowo, 2004)

Desa sebagai salah satu satuan atau wujud pemerintahan terendah dengan sejumlah pendudukyang merupakan kesatuan masyarakat dan bermukim dalam suatu daerah tertentu. Desa mempunyai kewenangan yang cukup luas dan menjadi tempat paling tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikankepentingannya guna menjawab keperluanseluruh masyarakat setempat. Desa memiliki hak melakukan pembangunan sosial sebagai satu sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah kabupaten/kota menyerahkan sepenuhnya kepada desa tentangpelaksanaan pembangunan yang ada di setiap desa.

Desa mempunyai kewenangan menata dan melayani warganya dalam semua aspek, baik dari segi pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah Desa amat dibutuhkan dalam berbagai segi kehidupan masyarakatnya, perubahan baru dan perhatian pemerintah Desa pada sarana dan prasarana desa.

Desa mempunyai peran penting dalam melaksanakan perubahan yang maksimal. Desa merupakan bagian terpenting daristruktur pemerintah dalam mewujudkan kesuksesan program pemerintah pusat. Dalam hal ini desa mempunyai kedekatan dengan masyarakat untuk lebih cepat menyampaikan informasi tentang program pemerintah. Desa berperan untuk melayani serta menata pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan desa.

Melaksanakan fungsinya sebagai pemerintahdesa memiliki tanggungjawab yang cukup berat, karena desa sebagai satuan organisasi yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada masa sekarang ini, peran pemerintah Desa amat menunjang semua bentuk pelaksanaan pembangunan. Berbagai aspek perubahan sosial yang direncanakan dengan pembangunan direalisasikan melalui pemerintah Desa. Agar bisa menjalankan perannya secara maksimal, pemerintah Desa perlu mengembangkan etos kerja sesuai dengan tujuan perencanaan kerja.

Perencanaan pembangunan merupakan tugas utama atau kegiatan bersama yang membutuhkan banyak tenaga baik secara langsung maupun tidak langsung dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan dibutuhkan dalam memenuhi keperluan pembangunan yang lebih besar dari sumber daya yang ada, agar proses pembangunan nasional dapat meraih tujuan pembangunan secara

maksimalseperti yang telah direncanakan dan ditentukan sebelumnya. Perencanaan pembangunanadalah suatu pengarahan penggunaan arah pembangunan yang terbatasi dalam memperoleh tujuan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik,dan efisien (Affifuddin,2010 : 47).

Dalam kaitannya dengan pembangunan Desa yang luas, tersusun rapat dan terprogram, untuk mencapai sasaran dan tujuannya selain ditunjang oleh manajemen pemerintah Desa yang baik, organisasi yang jelas juga sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat Desa yang bersangkutan.Efektifitaspembangunan merupakan suatu ukuran diperolehnya sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.Sehubunganadanya efektifitas pembangunan tersebut maka dukungan dan bantuan dari pemerintah dalam pembangunan Desa itu sendirisangat berarti.

Sekarangini, dalam membuat dan meningkatkan kehidupan masyarakat Desa semakin penting dilaksanakankarena hampir semua penduduk bermukim dipedesaan.Kekutsertaan masyarakat dalam urusanpembangunan sangat dinantikan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Otonomi daerah mensyaratkan kondisisumber dayamanusia yang mampu melaksanakan tugas, karena mereka lah yang nantinyaakan lebihbanyak memastikan bergeraknya suatu daerah dalammelaksanakan urusan pembangunan dan pemerintahan padaumumnya. Upaya dalam memperlancar kemakmuranmasyarakat daerah sebetulnya telah banyak dilaksanakan olehpemerintah melewati berbagai macam program pembangunan, sepertiDana Pembangunan Desa, Bantuan Inpres Desa Tertinggal,

bantuanbibit dan pupuk bagi petani, Kredit Usaha Tani, bantuan bergulir ternak sapi dan lain sebagainya.

Pembangunan Desa sebagai bagianyang perlu dari pembangunan nasional yang paling menjamah kehidupan masyarakatdipedesaan. Pembangunan desa seharusnyadimulai dari memperbaiki aparatdesa yakni orang yang merealisasikan rancangan serta mampu menciptakan kesenanganuntuk orang desa melewati prosesyang adil dan betul.

Untuktelaksananya pembangunan desa yang merupakan bagian pembangunan yang penting buat pemerintah, maka pelaksanaannya diserahkan kepada Kepala Desa sebagai koordinator dan administrator pemerintahanDesa. Selain itu, untuk dapat tercapainya pembangunan Desa diperlukan kemampuan Kepala Desa dalam bekerja sama dengan perangkat Desa dan masyarakat melalui lembaga-lembaga desa. Sementara itu tujuan pembangunan fisik yang dilaksanakan diDesa adalah untuk tercapainya pelayanan dibidang pemerintahan dengan baik, yang sebagian besar bersifatpembangunan fisik.

Di dalam pembangunan ditemui permasalahanyang sangat berkaitan untuk dibahas. Pertama, sebuah wilayah mulai dari desa sampai pada level Negara, jika tidak ada partisipasi masyarakat, tentu Negara tersebut akan jauh ketinggalan, sebab Negara merupakan kumpulan dari orang-orang yang menyatakan diri hidup bersama dalam satu wadah organisasi yang disebut negara. Kedua, pada era pemerintahan Orde Baru telah memaklumkan bermacam-macam upaya kebijakan dan program pembangunan pedesaan, tapi secara ril bisa dilihat bahwa situasi sosial ekonomi masyarakat pedesaan sangat jauh dari harapan.Maka dari itu,

pemerintah harus memperhatikan pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan pembangunan masyarakat pedesaan bukancumapada sektor pertanian, penyaluranbantuan akan tetapi pada urusan yang banyak bersentuhan penyelesaian bermacam-macam keperluan semua warga masyarakat agar mereka tidak bergantung pada orang lain, percaya dengan kemampuan diri sendiri, bebas dari mata rantai kemiskinan.

Pembangunan penting dilaksanakan dalam memperbaikikondisi ekonomi masyarakatberubah menjadi baik agar bisa terwujud tujuan dari batasan pembangunan pedesaan yang amat luas.Pentingnya upaya pemerintah Desa meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Desa.Maka sudahtentu membantu pemerintah Desa tidak susah untuk mewujudkannya. Pemerintah diharapkan lebih berperan dalammemberikan dorongan pada masyarakat, agar masyarakat turut berpartisipasi dalam pelaksanaanpembangunan Desa seperti pembangunan rabat beton, pembangunan jamban keluarga, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan jumat bersih.

Berdasarkan pengamatan pembangunan di Desa Oluhuta, terdapat beberapa penyebab yang mengakibatkan sedikitnya upaya pemerintah desa memberi dorongan pada masyarakat dalam membangun Desa seperti,kurangnya kerja sama antara pemerintah Desa dengan masyarakat, ketidaktahuan masyarakat dan yang tidak menghiraukan bagaimana pentingnya pertumbuhan di dalam usaha pemerintah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam pembangunanDesa, masyarakat condong tidak berpartisipasi di dalam kegiatan pembangunan serta sering bersikap apatis.

Bertitik tolak dari bagaimana upaya dalam membangun Desa, maka peneliti tertarik meneliti tentang pembangunan desa dengan judul “Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas, maka bisa dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

- 1) Bagaimana upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara ?
- 2) Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah agar memperoleh data dan informasi berkaitan dengan upaya pemerintah desa dan mengetahui sejauh mana upayanya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, serta sebagai pokok penyusunan proposal skripsi untuk memenuhi persyaratan menempuh ujian skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Universitas Ichsan Gorontalo.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara
- 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi tentang upaya pemerintah desa dalam membangun desa dan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

- 1) Civitas akademika Universitas Ichsan Gorontalo, memberi masukan kepada dosen dan mahasiswa di lembaga tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan penelitian terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
- 2) Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini dijadikan sebagai acuan dalam membangun kerja sama antar pemerintah desa dengan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan.
- 3) Bagi masyarakat, agar mengambil bagian untuk ikut serta dalam pembangunan desa bekerja sama dengan pemerintah desa.

- 4) Bagi penulis, dapat menambah wawasan baru dalam bidang pemerintahan sehingga ketika sudah terjun kelapangan dapat megaplikasikan pengetahuan dan wawasan yang diperoleh selama penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Upaya

2.1.1 Pengertian Upaya

Upaya dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti usaha, ikhtiar, untuk mencapai suatu maksud, menyelesaikan permasalahan, mencari jalan keluar. Berdasarkan makna dalam kamus besar bahasa Indonesia, dapat disimpulkan kata upaya mempunyai kesamaan makna dengan kata usaha, dan demikian dengan kata ikhtiar dan upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. (Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. 2008 :1784).

Menurut Poerwadarminta (2006 : 574) upaya adalah usaha untuk menyatakan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat usaha terhadap sesuatu hal agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain.

Dari pengertian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa upaya adalah suatu aktivitas atau usaha dengan menggunakan semua kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu permasalahan.

2.2 Pemerintah Desa

2.2.1 Pengertian Pemerintah

Secara etimologi Pemerintah bermula dari istilah perintah. Menurut Poerwadarmita (2006: 141) pemerintah adalah wewenang perintah satu Negara atau lembaga yang tertinggi yang menyuruh satu Negara seperti kabinet.

Samual Finer (2006: 98) mengatakan pemerintah secara sempit merupakan kegiatan memerintah diperbuat oleh eksekutif, yakni Presiden didukung oleh menteri dalam meraih tujuan Negara. Sedangkan pemerintah secara luas, yakni tindakan menyuruh yang diperbuat oleh legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam meraih tujuan Pemerintahan Negara.

Menurut Inu Kencana Syafie (2008: 89) pemerintahan memiliki wewenang untuk menjaga keamanan dan ketentraman dari dalam dan luar Negara. Oleh sebab itu, harus memiliki kesanggupan untuk mengendalikan angkatan perang atau kemampuan militer, harus memiliki kemampuan dalam penyusunan undang-undang, dan memiliki kemampuan untuk memenuhi keuangan masyarakat serta membiayai keberadaan negara melaksanakan ketentuan untuk kepentingan Negara.

Dari pendapat diatas, bisa disimpulkan pemerintah memiliki wewenang untuk memerintah dan melaksanakan setiap urusan Negara sesuai dengan peraturan untuk kepentingan Negara.

2.2.2 Pengertian Desa

Desa adalah satuan masyarakat yang mempunyai wewenang untuk memelihara rumah tangganya berdasarkan hak asalnya dan

kebiasaan yang dibenarkan dalam pemerintahan nasional dan bertempat di Daerah Kabupaten. Ini terkandung dalam perundang-undangan nomor 32 tahun 2004.

Menurut HAW(Widjaja, 2003 : 3) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang memiliki *aransemen orisinil* berdasar hak asalnya yang diutamakan. Dasar gagasan berkaitan dengan pemerintah Desa adalah keragaman, pemberdayaan masyarakat, otonomi asli, partisipasi, dan demokrasi.

Peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2014 berkaitan dengan Desa melukiskan tekad negara untuk mengotomikan desa, dari bermacam kesiapan pemerintahan desa dalam pemilihan calon pemimpin desa, dana desa, DPRD desa, serta kesiapan penyusunan ketentuan desa seperti perda, mengakibatkan wilayah otonomi menjadi provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Reformasi sudah meraih dasarnya, kesadaran peraturan desa diprediksiakan membangkitkan proses perubahan berdasar otonomi daerah bersifat abadi.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa desa merupakan kelompok yang menata pribadinya sendiri, mempunyai wewenang untuk memelihara dan menata kebutuhan masyarakatnya tepat dengan warga setempat, maka posisi desa memiliki sumber daya alam sangat strategis, maka dari itu membutuhkan perhatian terhadap pelaksanaan pembangunan, karena dengan sumber daya desa yang baik akan berpengaruh secara signifikan pelaksanaan sumber daya daerah.

2.2.3 Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah pelaksana persoalan pemerintah dan kebutuhan masyarakat dalam susunan pemerintahan (Permen no 113 tahun

2014). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur pelaksana pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan institusi penyambung pemerintah pusat mempunyai peran strategis dalam menata masyarakat dipedesaan demi menciptakan pembangunan pemerintah. Dari peran itulah, ditetapkanaturan prundang-undangan yang berhubungan dengan pemerintah desa yang menata tentang pemerintah desa, supaya roda pemerintah terlaksana dengan baik.

Menurut HAW Widjaja (2003: 3) Pemerintahan Desa merupakan pelaksanaan pemerintahan Desa merupakan cabang lembaga dari lembaga penyelenggara pemerintah, sehingga Desa mempunyai wewenang membuat menata dan mengurus kebutuhan warga masyarakat. Kepala Desa bertanggungjawab kepada BPD dan menyatakan laporan realisasi tersebut kepada Bupati.

Pemerintah adalah sekumpulan individu yang memiliki kuasa khusus dalam melakukan kekuasaan yang secara memberi perlindungan dan menumbuhkembangkan taraf hidup masyarakat dengan perbuatan dan pelaksanaan bermacam penetapan (Bayu Surianingrat, 2008 : 9-10). Dalam undang-undang nomor 30 Tahun 2014 berkaitan administrasi pemerintahan pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintah adalah melaksanakan administrasi pemerintahan yang terdiri dari tugas mengatur, melayani, membangun, memberdayakan dan melindungi.

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan pemerintah desa ialah pelaksanaan dan penyelenggara pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa yakni kepala desa dan perangkat desa.

2.2.4 Struktur Pemerintahan Desa

Pemerintah desa meliputi pimpinan Desa danaparat Desa, yang terdiri dari sekretaris dan perangkat lainnya. Adapun strukturorganisasi yaitu sebagai berikut :

1) Kepala Desa

Kepala desa adalah pimpinan desa yang dibantuaparat desa sebagai penyelenggara pemerintah desa.Kepala desa bertugas melaksanakan pemerintah desa, melakukan pertumbuhan desa, perbaikan kemasyarakatan, perberdayaanmasyarakat desa (UU no 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 dan 3). Keharusan kepala desa dalam undang-undangno 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 4 adalah:

- a) mempraktekan Pancasila, melaksankan undang-undang dasar tahun 1945, dan menjaga keutuhan NKRI, dan bhineka tunggal ika
- b) menatar kemakmuran masyarakat
- c) menjaga kententaraman warga masyarakat
- d) patuh dan mendirikan aturan perundang-undangan
- e) menyelenggarakan hidup demokrasi dan berkeadilan gender
- f) melakukan asassusunan pemerintahan yangbaik, terbuka, profesional, maksimal, bersih, serta bebas dari korupsi
- g) membuat kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan desa
- h) melakukanpengadministrasian pemerinahan yang bagus
- i) mengurusdengan baik keuangan dan sarana dan prasarana desa
- j) melakukan urusan pemerintah yang menjadi wewenang desa

- k) menuntaskan setiap permasalahan
 - l) meningkatkan ekonomi warga masyarakat
 - m) meneruskan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat
- 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa adalah badan yang melakukan fungsi pemerintahan yang beranggotakan wakil dari penduduk desa berdasar atas keterwakilan lokasi dan ditentukan secara demokratis (UU RI no 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 4 tentang UU Desa). Fungsi BPD yakni adalah: (UU no 6 tahun 2014 pasal 55)

- a) membicarakan dan menyetujui Rancangan aturan Desa bersama-sama dengan kepala desa
 - b) memuat dan mengalirkan harapan masyarakat
 - c) mengawasi pekerjaan kepala desa
- 3) Sekretaris

Merupakan aparadesa yang bertugas menolong kepala desa menyediakan dan melakukan pengurusan administrasi desa, menyiapkan pelaporan penyelenggaran pemerintahan desa. Sekretaris desa berfungsi sebagai berikut :(UU no 6 tahun 2014 pasal 55)

- a) mengadakan urusan pengadministrasian dan mempersiapkan alat-alat untuk melancarkan kerja kepala desa
- b) menolong menyusun peraturan
- c) menyiapkan alat pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan
- d) mengkoordinasikan penyelenggaraan pertemuan teratur

- e) pelaksanaan kerja yang diamanatkan kepada kepala desa
- 4) Pelaksana Teknis Desa
- a) Kepala Urusan Pemerintahan
- Tugas kepala urusan pemerintah ialah menolong kepala desa mengelola administrasi kemasyarakatan, pertahanan, menjaga keamanan dan kepatuhan masyarakat, menyiapkan alat rumusan penetapan, kebijakan menyusun aturan desa. Kemudian fungsinya yakni, 1) melakukan administrasi kependudukan; 2) menyiapkan alat-alat penyusunan rancangan tata aturan desa dan putusan kepala desa; 3) melakukan urusan administrasi pertanahan; 4) melakukan urusan pembukuan desa; 5) menyediakan bantuan dan melakukan kegiatan pengaturan institusi masyarakat demi kelancaran pelaksanaan pemerintahan; 6) menyediakan pertolongan dan melakukan urusan kemasyarakatan terkait dengan upaya menghasilkan ketertiban dan keamanan masyarakat serta ketahanan sipil.
- b) Kepala Urusan Pembangunan
- Tugas kepala urusan pembangunan adalah menolong kepala desa menyiapkan alat rumusan penetapan teknis peningkatan perekonomian masyarakat dan potensi desa, mengelola administrasi pembangunan, mengelola layanan masyarakat serta menyusun alat pelaksanaan kerja yang sudah ditugaskan. Fungsinya yakni :1) menyediakan pertolongan, penyelidikan, dan mengkaji pertumbuhan perekonomian masyarakat;2) melakukan

urusan pengadministrasi pembangunan; 3) melakukan tugas yang telah diberikan(UU no 6 tahun 2014 pasal 55).

c) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

Tugas kepala urusan kesejahteraan rakyat adalah menolong kepala desa untuk menyediakan alat dalam merumuskan penetapan teknis penyusunan program keagamaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Fungsinya adalah: 1) menyediakan alat dan melakukan program kegiatan keagamaan; 2) menyediakan dan melakukan program pertumbuhan hidup beragama; 3) menyiapkan alat dan melaksanakan programsosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

d) Kepala Urusan Keuangan

Tugas Kepala Urusan Keuangan adalah menolong sekretaris desa melakukan pengelolaan asal pendapatan desa, mengelola penatausahaan keuangan dan menyiapkan alat menyusun APBDesa, serta pelaporan keuangan. Fungsinya adalah: 1) mengelola penatausahaan keuangan desa; 2) menyiapkan alat penyusunan desa APBDesa; 3) menyusun pertanggungjawaban keuangan(UU no 6 tahun 2014 pasal 55).

e) Kepala Urusan Umum

Tugas Kepala Urusan Umum adalah menolong sekretaris desa melakukan penatausahaan numum, kearsipan, pengelolaan asetdesa, dan menyiapkan agenda rapat dan pelaporan. Fungsinya adalah: 1) melakukan penatausahaan surat masuk dan surat keluar serta mengatur

kearsipan desa; 2) melakukan pembukuan aset desa; 3) mengelola administrasi umum; 4) menyedia, menyimpan dan penyalurbarang habis pakai serta merawat alat kantor; 5) mengatur administrasi aparat desa; 6) menyusun laporan.

5) Pelaksana Kewilayah

Kepala dusun bertugas membantu kepala desa melakukan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan kententuan yang ada. Kepala dusun berfungsi sebagai berikut:

- a) menolongmelaksanakan tugas kepala desa di lokasi kerja yang telah ditentukann
- b) melakukan urusan pemerintahan dan pembangunan
- c) melakukan penetapan yang telah ditetapkan oleh kepala desa
- d) menolong kepala desa melakukanagenda pembinaan kerukunan warga
- e) membuat swadaya masyarakat
- f) membuatinformasi program pemerintah desa
- g) penyelenggara tugas lain yang dibebankan oleh kepala desa(UU no 6 tahun 2014 pasal 55).

2.2.5 Peran Perangkat Desa

Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014, pemerintah Desa adalah pelaksanakegiatan pemerintah dankebutuhan masyarakat dalam susunan pemerintahan negera Indonesia.Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu aparat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah. Kepala Desa

mempunyai kekuasaan pengelolaan keuangandesa yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan aset desa yang dipisahkan, mempunyai wewenang(Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) :

- 1) Menentukan ketetapan pelaksanaan APBDes
- 2) Menentukan pelaksana tehnis pengelolaan keuangan Desa
- 3) Mengizinkan pelansanaan kegiatan yang ditentukan dalam APBDes
- 4) Melaksanakanperbuatan yang menyebabkan pengeluaran beban APBDes.

Kepala desa dalam mengelola keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Tehnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dari unsur perangkat desa dan ditentukan dengan keputusan Kepala Desa yang terdiri dari (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) :

- 1) Sekretaris Desa
- 2) Kepala Seksi
- 3) Bendahara

Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, mempunyai tugas sebagai berikut (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) :

- 1) Membuat dan melaksanakan ketetapan pengelolaan APBDes
- 2) Menyusun peraturan APBDes,perubahan APBDes dan laporan pelaksanaan APBDes
- 3) Mengendalikan pelaksanaan agenda yangsudah ditetapkan dalam APBDes
- 4) Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes

5) Melaksanakan pemeriksaan bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes Kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan yang sesuai dengan keahliannya dengan tugas sebagai berikut (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) :

- 1) Merencanakan pelaksana urusanya yang merupakan tanggungjawabnya
- 2) Melakukan urusan bersama-sama dengan badan kemasyarakatan desa yang sudah ditentukan didalam APBDes
- 3) Melaksanakan perbuatan pengeluaran beban anggaran belanja kegiatan
- 4) Mengatur penyelenggaraan agenda kegiatan
- 5) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa
- 6) Menyediakan dokumen pengeluaran anggaran belanja pelaksanaan kegiatan

Bendahara di duduki oleh staf urusan keuangan, bertugas menyimpan, membayar, menerima, menata usahaikan, mengarsipkan, membuat pembukuan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan anggaran desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014).

2.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Partisipasi masyarakat adalah suatu proses aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun secara berkelompok masyarakat untuk menyatukan keperluan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat tersebut. Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam keadaan

kelompok yang mendorongnya untuk memberikan bantuan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. (Daniel, 2013 : 49).

Partisipasi dapat dipahami dalam dua hal yaitu: 1) Partisipasi merupakan salah satu alat, dimana partisipasi dipandang sebagai sebuah teknik untuk membantu memajukan program desa atau disebut pembangunan, 2) Partisipasi sebagai salah satu tujuan itu sendiri yang bisadinyatakan sebagai pemberdayaan rakyat yang dipandang dari aspek perolehan keahlian, pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk memperolehtanggungjawab yang lebih besar untuk membangun.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia partisipasi yaitu tindakan ikut mengambil bagian, keikutsertaan atau ikut serta. Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang memiliki hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui penghubungan institusi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan berucap dan berpartisipasi secara konstruktif.

Pada suatu masyarakat yang telah berkembang, tingkat partisipasi masyarakat tersebut pun bisa dikatakan cukup baik, tingkat ini tergantung dari kesadaran masyarakat adalah tanggungjawabnya terhadap pembangunan, rasa tanggungjawab dan kesadaran ini harus muncul, apabila mereka dapat menyetujui salah satu hal atau dapat meresap suatu nilai. Untuk itulah dibutuhkan adanya perubahan sikap mental ke arah yang lebih baik yang bisa mendukung pembangunan.

Partisipasi masyarakat bisa didefinisikan sebagai keterkaitan dan pelibatan warga masyarakat dalam pembangunan, menyangkutaktivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.Peningkatan partisipasi masyarakat tersebut merupakan suatu bentuk pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) secara aktif yang terfokus pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat (pedesaan).

Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih aktif dan efisien, yaitu dalam hal sebagai berikut :

- 1) Segiinput atau masukan (sumber daya manusia, sarana, dana, rencana, data, dan teknologi);
- 2) Segi proses (monitoring, pelaksanaan, dan pengawasan);
- 3) Segioutput atau keluar atau (pencapaian efektifitas, sasaran, dan efisiensi). Partisipasi masyarakat telah sekian lama dibicarakan dan didengarkan dalam berbagai forum dan kesempatan.

Partisipasi terkaitdua dimensi yakni kedalam dan keluar, yaitu:

- 1) Terkait partisipasi yang melibatkan pemerintahan itu sendiri;
- 2) Terkait partisipasi warga desa terhadap jalannya pemerintahan.

Partisipasi yang menyangkutpemerintah itu sendiri adalah terkait sejauh mana ke ikut sertaan perangkat desa dalam membangun desa, hal ini bisa dilihat dari penegakkan demokrasi, menjalin hubungan yang harmonis dengan lembaga adat ataupun agama yang ada, pengelolaan konflik dan menciptakan masyarakat

yang mandiri serta menjalankan pemerintahan yang baik dan benar sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan, yaitu :(Daniel, 2013 : 52).

- 1) Partisipasi atau keikutsertaan dalam proses penentuan strategi, arah, dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah;
- 2) Kikutsertaan dalam memikul tanggungjawab dan beban dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- 3) Keikutsertaan dalam memanfaatkan dan memetik pembangunan secara berkeadilan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan porsikeseluruhan yang harus ditumbuh kembangkan, yang akan menumbuhkan rasa tanggungjawab (*sense of responsibility*), rasa memiliki(*sense of belonging*), dari masyarakat secara sadar, bergairah dan tanggungjawab. Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan yang selalu diabaikan dan hampir tidak terlihat adalah partisipasi dalam hal pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan selama ini dasar yang ada adalah kebijakan yang diambil secara sepihak yaitu pemerintah itu sendiri baik dari level yang paling atas (Pemerintah Pusat) sampai pada akhirnya jatuh kepada Kepala Desa.

2.4 Konsep Pembangunan Desa

2.4.1 Pembangunan Desa

Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Menurut Sjafrizal (2016:15) perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik. Karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan suatu perencanaan yang mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait seperti Planologi, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Pemerintahan, dan Sosial Budaya.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan integrasikan dengan rencana pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan meliputi:

- 1) Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;

- 2) Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- 3) Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- 4) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Ada tiga prinsip pokok pembangunan perdesaan, yaitu:

- 1) Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan disetiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi pembangunan. Ketiga unsur Trilogi pembangunan tersebut yaitu:
 - a) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil;
 - b) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; dan
 - c) Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan disetiap sektor, termasuk
- d) desa dan kota, disetiap wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
- 2) Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
- 3) Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan.

Pasal 79 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa:

- 1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacup ada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- 2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana maksud ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

2.5 Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

2.5.1 Pembinaan Kepada Masyarakat

Pembinaan masyarakat Desa, secara teoritis dapat dikategorikan menjadi tiga macam pendekatan, yaitu: mobilisasi, partisipasi dan akulterasi.(Sjafri Sairin, 2002:4) Pembinaan yang menekankan pada mobilisasi pada dasarnya berangkat dari model pembangunan *top down* (masyarakat yang menjadi sasaran tidak mempunyai andil apapun dalam merencanakan pembangunan yang dilakukan). Pendekatan ini telah terbukti banyak membawa dampak negatif dalam masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan. Namun demikian Syafri Sairin mengatakan bahwa pendekatan seperti ini hanya sesuai untuk masyarakat yang tingkat pendidikan dan wawasannya rendah.

Menurut Sumodiningrat (2007 : 47), pembinaan kepada masyarakat tidak selamanya melainkan dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat belajar, hingga mencapai status mandiri. Proses pembinaan masyarakat mengandung beberapa tahap meliputi:

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.(Syarif Makmur, 2008 : 58)

Untuk mendapatkan dampak atau hasil yang baik dan maksimal, upaya pembinaan masyarakat desa harus memegang prinsip-prinsip tertentu sebagai pedoman. Prinsip-prinsip tersebut adalah: *pertama*, harus dilakukan secara integral, meliputi kegiatan mental spiritual-material dalam segala aspek hidup dan kehidupan. *Kedua*, harus merupakan swadaya dan kegotong-royongan masyarakat sendiri, dengan bantuan minimal dari luar. *Ketiga*, pembangunan dilaksanakan atas dasar *two-way-traffic* (timbal balik) antara rakyat dengan pemerintah. *Keempat*, pembangunan merupakan usaha yang terus menerus (*on going process*) yang meningkat terus (*an even increasing standard of living*). *Kelima*, pembangunan didasarkan atas kebutuhan terasa (*felt needs*) masyarakat. *Keenam*, pembangunan dilaksanakan dengan kaderisasi (*cader forming*). Usaha pembangunan harus memunculkan pemimpin-pemimpin baru yang selama ini laten sebagai generasi pewaris untuk melaksanakan pembangunan selanjutnya.

2.5.2 Pelibatan Masyarakat Dalam Pembangunan

Strategi dasar yang dilakukan dalam pembuatan kebijakan adalah pembangunan yang diarahkan seminimal mungkin agar tidak terjadinya kesenjangan antara lain dengan mengurangi jumlah pengangguran yang ada

Pelibatan masyarakat desa dalam proses-proses pengambilan kebijakan publik yang diselenggarakan pemerintah desa. Desa tidak hanya terdiri dari pemerintah desa, tapi ada elemen masyarakat yang salah satunya terwakili melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, maka setiap kebijakan strategis desa hendaknya dilandasai atas musyawarah mufakat semua elemen desa. Di samping itu salah satu yang menjamin peran dinamis organisasi masyarakat sipil di desa adalah libatannya mereka ke dalam arena perumusan dan pengambilan kebijakan desa. Melalui cara ini, secara tidak langsung pemerintah desa telah mengedepankan prinsip penghormatan, partisipasi dan emansipasi warga dalam pembangunan. Dari sinilah nanti akan lahir proses *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Amirullah, 2015:5).

Pemerintah Desa dan lembaga yang terkait termasuk masyarakat sebagai yang menjalankan roda pembangunan di Desa yang bertujuan menciptakan suatu Keadaan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Makapembangunan merupakan upaya yang dilakukan untuk membawa masyarakat kepada keadaan yang lebih maju, sejahtera dan mandiri.

Pemerintah Desa melalui kerja sama dengan lembaga, tokoh-tokoh dan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan yang dilakukan secara gotong royong untuk membangun desa, tujuannya agar masayarakat bisa sebagai pengontrol kualitas pembangunan dan terlibat langsung dalam pembangunan Desa.

2.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat

2.6.1 Faktor pendukung partisipasi masyarakat

Menurut maskun dalam Mulyadi (2009:101)mengatakan bahwa partisipasi ditentukan oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Sesuai dengan Kebutuhan masyarakat
- 2) Merupakan kepentingan dan minat masyarakat
- 3) Sesuai dengan adat istiadat masyarakat
- 4) Sifatnya mengikat setiap anggota masyarakat yang satu dengan yang lain.

Selain itu faktor pendukung terjadinya partisipasi masyarakat juga diungkapkan oleh (Khairuddin, 1992:126) bahwa suatu partisipasi yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilihat dari segi motivasinya,karena ada paksaan dari atasannya, karena hanya mengikuti anggota masyarakat yang lain sebagai rasa solidaritas antar masyarakat, dan kesadaran dari anggota masyarakat tersebut.

Menurut Goldsmith danBlustain(Ndraha, 1987:105) bahwa masyarakat ikut berpartisipasi apabila:

- 1) Adanya organisasi yang dikenal.
- 2) Adanya kebermanfaatan partisipasi.
- 3) Manfaat yang diperoleh dengan ikut berpartipasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan maupun keinginan masyarakat.
- 4) Pada setiap proses partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat harus ada kendali yang dilakukan masyarakat.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung partisipasi masyarakat ditentukan oleh kebutuhan masyarakat, kepentingan dan minat masyarakat, adat istiadat, dan yang paling penting adalah sifatnya yang mengikat.

2.6.2 Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Dalam suatu masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut pendapat Rahardjo Adisasmita (2006: 135):

- 1) Sikap masa bodoh, apatis dan juga sifat malas. Selain itu tidak adanya keinginan untuk merubah keadaan tersebut.
- 2) Adanya makna–makna tipologi. Merupakan ciri fisik dari suatu wilayah, kedalaman, ketinggian, luas wilayah atau bisa dikatakan sebagai kondisi dari suatu wilayah tertentu
- 3) Dipengaruhi oleh letak geografisnya.
- 4) Jumlah Penduduk
- 5) Keadaan ekonomi desa tersebut.

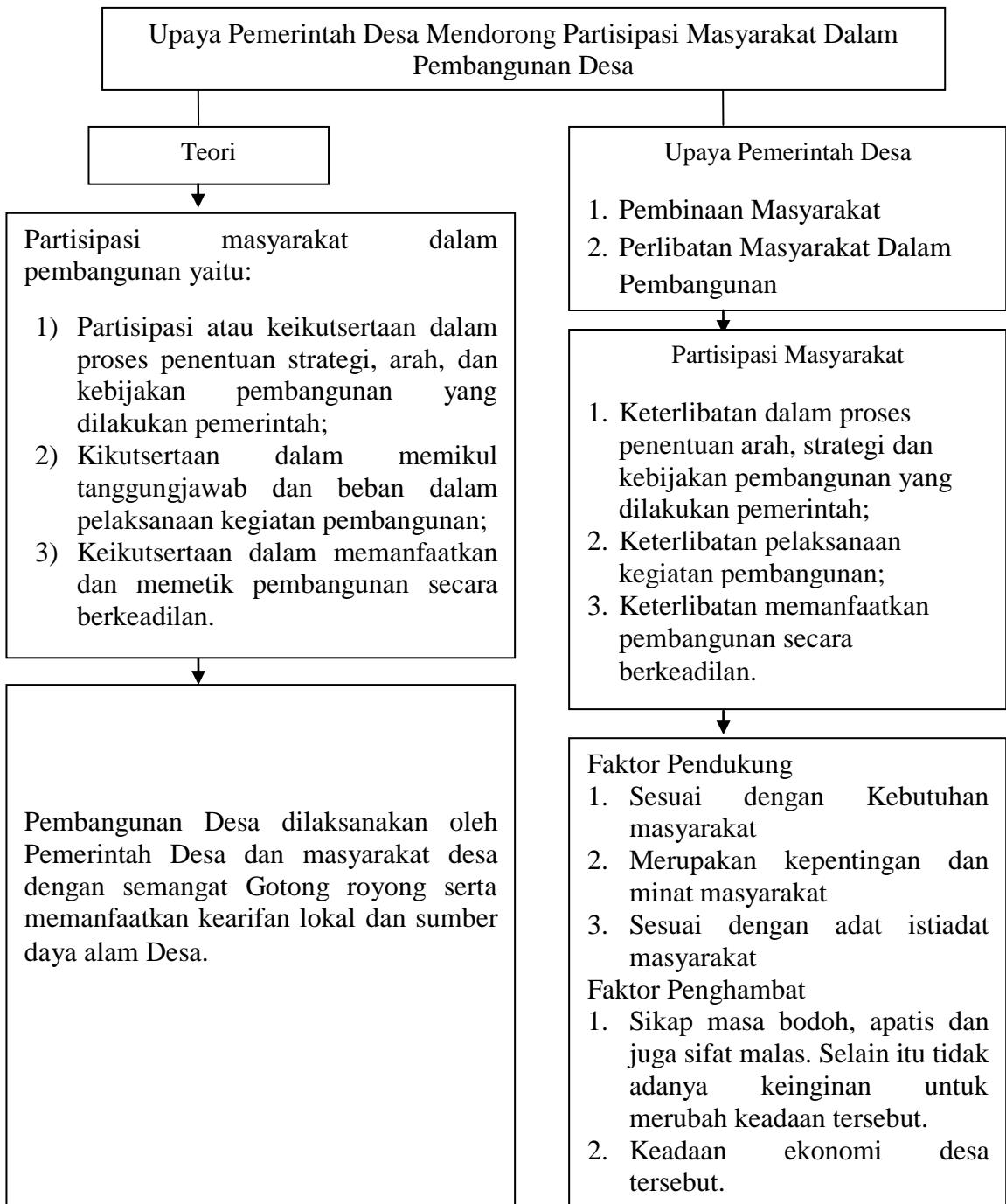
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat itu terdiri dari beberapa faktor seperti sikap masyarakat yang acuh tak acuh terhadap perubahan dimasyarakatnya. Selain itu faktor yang kedua adalah kondisi geografis tempat tinggal masyarakat tersebut dan yang ketiga adalah ekonomi Desa tersebut.

2.7 Kerangka Fikir

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Penurunan ini sebagai salah satu indikator tercapainya tujuan pembangunan yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud kesejahteraan bukanlah hanya sekedar terpenuhinya kebutuhan pokok yang terdiri dari pangan, sandang, dan perumahan atau pemukiman, namun berkaitan dengan tercapainya swasembada kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, peningkatan rasa percaya diri untuk hidup mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain, dan diperolehnya kebebasan untuk mengembangkan usaha memperbaiki mutu hidup tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

Peneliti berusaha untuk menggali informasi apakah upaya pemerintah desa berjalan dengan baik atau masih ada pihak dominan dalam pembangunan. Dengan menggunakan teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta pembangunan desa, peneliti mencoba mendeskripsikan upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan desa.

Berdasarkan pernyataan diatas, tinjauan landasan teori, dan penelitian dapat disusun sebuah kerangka pemikiran teoritis yang tersaji pada gambar berikut:

**Gambar 1.1. Kerangka Fikir**

Dari gambar di atas, dapat dikatakan dalam membangun desa diperlukan adanya upaya pemerintah desa dan masyarakat untuk saling bekerja samauntuk mewujudkan pembangunan yang seutuhnya.Pemerintah desa sebagai salah satu

ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat tetap. Perihal ini disebabkan pemerintah desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Pemerintah desa mempunyai peran untuk mengurusi serta mengatur semua pembangunan di desa bersama dengan masyarakat dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai bersama.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Loflan, yang dikutip dalam bukunya Lexy J Maleong, berpendapat sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lofland, dalam Lexy J Maleong, 2011:112). Hal serupa menurut Bogdan dan Taylor bahwa prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh (Lofland, dalam Lexy J Maleong, 2011:3).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Agustus 2020. Lokasi penelitian yaitu wilayah Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Peneliti memilih lokasi penelitian di seluruh wilayah Desa Oluhuta karena mengingat masalah yang diteliti yaitu mengenai upaya pemerintah desa dalam membangun desa yang dikelola oleh perangkat desa dan dilaksanakan dalam lingkup desa itu sendiri dipandang perlu untuk dikaji lebih mendalam.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun

Desa dan faktor yang mendukung dan menghambat upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun Desa.

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka fokus penelitian adalah :

- 1) Pembinaan kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelestarian lingkungan
- 2) Pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa
- 3) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini terbagi atas dua, yaitu :

- 1) Data Primer

Data primer; yaitu data yang di peroleh dari observasi dan wawancara langsung dengan subjek dan pedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

- 2) Data Sekunder

Data sekunder; yaitu data yang berbentuk dokumentasi atau arsip penting yang di peroleh melalui dinas tertentu seperti, buku, majalah, dokumentasi lain yang relevan dengan penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Informan merupakan orang-orang yang terlibat langsung dalam permasalahan penelitian. Informan dipilih untuk menggali informasi tentang pembangunan infrastruktur desa serta bagaimana pemanfaatan dana desa tersebut. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan penarikan

sampel secara subjektif yang dianggap berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekretaris Desa
- 3) Aparat Desa
- 4) Masyarakat

3.6 Pengumpulan Data

Dalam mengumpul data penulis menggunakan beberapa metode yang akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Observasi

Metode observasi merupakan teknik awal yang di gunakan dalam prosedur pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran umum terhadap obyek serta lokasi penelitian. Dimana observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji tingkah laku atau keadaan yang akan diteliti sambil berperan serta dalam aktivitasnya (Moleong, 2011: 135). Dalam kegiatan observasi, hal-hal yang diamati diantaranya: keluarga, masyarakat.

- 2) Wawancara

Wawancara dalam peneliti ini adalah untuk melengkapi dan memperdalam hasil penelitian. Di mana metode wawancara adalah teknik dalam upaya menghimpun data yang akurat untuk diperlukan dalam melaksanakan prosespemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data, metode ini merupakan alat mengumpul data untuk memperoleh informasi

langsung dari sumbernya, dengan melakukan wawancara peneliti dapat mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Dalam wawancara ini obyek penelitian yaitu pemerintah desa dan masyarakat di Desa Oluhuta.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang di gunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto) dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian (Iman Gunawan' 2013: 178).

3.7 Teknik Analisis data

Model analisis data di gunakan peneliti adalah model interaktif yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus.

1. Pengumpulan Data dalam tahap ini peneliti melakukan studi awal melalui observasi.
2. Penyajian data, setelah data setelah data direduksi maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah mendisplaykan data. Penyajian data yang dilakukan peneliti adalah dengan jalan membuat gambaran tentang bagaimana cara keluarga meningkatkan motivasi belajar peserta didik.
3. Penarikan kesimpulan, dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara. Dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data

berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, kemudian mengembangkan suatu teori dari data tersebut.

Teknik yang bersifat kualitatif, yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang di pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Ahmad Tanzeh, 2009:57).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambar Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola

Obulusa atau Oluhuta adalah hutan belantara yang ditempati oleh beberapa orang saja, di beberapa tahun kemudian Obulusa atau Oluhuta ini telah di datangi oleh orang-orang yang berasal dari Tapa dan Siendeng (Kota Selatan). Karena kondisi di Obulusa atau Oluhuta medannya berbukit- bukit dan tanahnya adalah tanah lilin yang sangat licin dan mudah orang terpleset sehingga orang yang tinggal di Obulusa atau Oluhuta ketika melakukan perjalanan harus menggunakan tongkat sebagai penyangga agar tidak mudah terpleset. Dengan kondisi medan seperti itu maka, pada saat itu mereka memberikan nama “Obulusa” (Bahasa Atinggola) yang artinya medan yang licin mudah orang terpleset (jatuh).

Setelah beberapa lama kemudian mereka tinggal di oluhuta akhirnya mereka menikah dan memiliki anak/keturunan sehingga bertambahlah penduduk dan telah dilakukan musyawarah, sepakat memberikan nama kampung menjadi “Oluhuta”.

Oluhuta sebelumnya adalah sebuah Dusun yang berada di wilayah Desa Kotajin, pada tanggal 3 Maret 2006 berdasarkan aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti dengan rapat yang dihadiri oleh seluruh masyarakat Dusun Oluhuta maka dibentuklah Panitia Pemekaran Desa Oluhuta dengan tata wilayah memiliki luas wilayah 369 Ha, Jumlah Penduduk 602 jiwa dan di bagi 3 dusun,

yaitu Dusun Bukit Harapan, Dusun Idaman dan Dusun Gosuo Dalam pemekaran tersebut disetujui oleh anggota BPD dan LPM serta Kepala Desa Kotajin,

Waktu berlalu dan hari berganti serta tahun ke tahun di nantikan, maka aspirasi masyarakat untuk memekarkan diri menjadi satu desa definitif terwujud dan resmi pada Tahun 2011 setelah di adakannya pengresmian Desa Oluhuta menjadi salah satu desa definitive dari tujuh pemekaran Desa di Kecamatan Atinggola dan di lantiknya Pejabat Kepala Desa Bapak Jurdin Bakari oleh Bapak Bupati Gorontalo Utara Drs. Rusli Habibie pada tanggal 10 Januari 2011.

2. Visi, Misi, dan Tujuan Desa Oluhuta

Adapun Visi dan Misi Kepala Desa adalah :

a) Visi

“Mewujudkan Desa Oluhuta yang bersatu, Maju, Sejahtera dan Religius.”

b) Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut , maka dilaksanakan Misi yakni :

- Mewujudkan Pemerintahan Desa Oluhuta yang bersatu.
- Mewujudkan Desa Oluhuta Yang Maju.
- Mewujudkan Desa Oluhuta yang Sejahtera dan Religius.

c) Tujuan

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa

dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: Hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan tujuan pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

- Mengetahui informasi penyelenggaraan pemerintahan desa
- Dasar penyampaian aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab oleh masyarakat
- Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa.

3. Data Perangkat dan Lembaga Desa

Perangkat dan lembaga desa sejak tahun 2019 s/d 2020 telah beberapa kali mengalami perubahan menyesuaikan peraturan yang ada baik peraturan menteri, peraturan daerah maupun peraturan Bupati. Hingga akhir tahun 2020 susunan perangkat dan lembaga Desa Oluhuta secara jelas dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Data Perangkat Desa Oluhuta

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
1.	Hamran Ahaya	SMA	Kepala Desa
2.	Basrin Lakoro	SMA	Sekdes
3.	Susiyati Manti S.Pd	S1	Kaur Keuangan dan Perencanaan
4.	Rosnawati Kamaru	SMA	Kepala Urusan Tata Usaha dan Pelayanan Umum
5.	Fatma Ahaya	SMA	Kasi Pemerintahan dan Pembinaan
6.	Elmi Van Gobel	SMA	Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan
7.	Rahmayanto Gobel	SMA	Operator
8.	Agusalim Nakoda	SMA	Kadus Bukit Harapan
9.	Wahidin Hulalata	SD	Kadus Idaman
10.	Rudin Korompot	SD	Kadus Gusuo

Sumber Data : Profil Desa Oluhuta Tahun 2020

Tabel 1.1 menunjukkan data keadaan perangkat desa berjumlah 10 orang yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kepala urusan tata usaha, kasi pemerintahan, tenaga operator, dan kepala dusun.

Tabel 1.2 Data Lembaga BPD

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
1	Masrun Ahmad	SMA	Ketua
2	Najirun Gobel	SMA	Wakil Ketua
3	Herman Nakoda	SMA	Sekertaris
4	Adrianto La	SMA	Anggota
5	Laprin La	S1	Anggota

Sumber Data : Profil Desa Oluhuta Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.2 data lembaga Badan Permusyawaratan Desa berjumlah 5 orang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota-anggota.

Tabel 1.3 Data Lembaga LPM

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
1	Ramang Moha	SMA	Ketua
2	Mursin Gobel	SMP	Sekertaris
3	Monua Gobel	SD	Anggota
4	Tahir Hulalata	SD	Anggota
5	Yusran Sayedi	SD	Anggota

Sumber Data : Profil Desa Oluhuta Tahun 2020

Dari tabel 1.3 jumlah lembaga permusyawaratan masyarakat berjumlah 5 orang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.

Tabel 1.4 Data Lembaga PKK

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
1	Misran Pulumoduyo	S1	Ketua
2	Arsin Gobel	SMA	Sekertaris
3	Hatim Monoarfa	SMA	Bendahara
4	Elmi Van Gobel	SMA	Ketua Pokja I
5	Saleha Hula	SMA	Ketua Pokja II
6	Mastin Karim	SMA	Ketua Pokja III
7	Serlin Lakoro	SMA	Ketua Pokja IV

Sumber Data : Profil Desa Oluhuta Tahun 2020

Dari tabel 1.4 jumlah lembaga PKK berjumlah 7 orang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua pokja I s/d ketua pokja IV.

4. Demografi Desa Oluhuta

Gambaran penduduk menurut beberapa klasifikasi dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Desa Oluhuta menurut Jenis kelamin dan Wilayah
Penyebaran Tahun 2020

NO	DUSUN	JUMLAH L/P		JUMLAH
		L	P	
1	BUKIT HARAPAN	135	126	261
2	IDAMAN	147	140	287
3	GUSUO	34	39	73
TOTAL JUMLAH		316	305	621

Sumber Data : Profil Desa Oluhuta Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat ditunjukkan bahwa penduduk Desa Oluhuta didominasi oleh laki-laki 50.89 % dan perempuan 49.11 %, sedangkan kepadatan penduduk berada pada Dusun Idaman sejumlah 287 jiwa (46.22 %). Sedangkan menurut kelompok umur didominasi oleh penduduk umur 15 -55 tahun yakni 63 %, selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.5 Data Penduduk Desa Oluhuta menurut Kelompok Umur Tahun 2020

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH L/P		JUMLAH
		L	P	
1	0-14	77	85	162
2	15-55	203	188	391
3	> 56	36	32	68
TOTAL JUMLAH		316	305	621

Sumber Data : Profil Desa Oluhuta Tahun 2020

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari segi kategori usia, penduduk usia produktif lebih besar dari usia tidak produktif.

5. Data Sarana dan Prasarana Desa Oluhuta

Sarana prasarana yang sudah di bangun di Desa Oluhuta sejak Tahun 2020 baik program di perbantukan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dan atau melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Sarana Prasarana Tahun 2020

NO	JENIS KEG	VOLUME	SATUAN	SUMBER DANA
1	Bibit Ternak Sapi	31	Ekor	APBDES
2	Rabat Beton	300	M	APBDES
3	Jamban Kel	20	Unit	APBDES
4	Mahyani	2	Unit	APBDES
5	Lisdes	2	Unit	APBD II
6	Jaringan Perpipaan	1	Ls	APBD II
7	Jalan Tani	311	M	APBN
8	Kantor Desa	1	Unit	APBN

Sumber Data : Profil Desa Oluhuta Tahun 2020

Sebagaimana terinci pada tabel di atas, jumlah bibit ternak sapi berjumlah 31 ekor, rabat beton panjang 300 meter, jamban keluarga berjumlah 20 unit, mahyani berjumlah 2 unit, lisdes berjumlah 2 unit, jaringan perpipaan 1 Ls, pembangunan jalan tani panjang 311 meter, dan kantor desa berjumlah 1 unit.

4.1.2 Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta

1) Pembinaan Masyarakat Desa Oluhuta

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sangat diperlukan upaya dan usaha pemerintah untuk memberikan pembinaan dan pemahaman tentang pentingnya turut serta dalam pembangunan desa demi tercapainya tujuan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, pemerintah desa dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat, dalam hal ini kepala desa, sekretaris desa, BPD, LPM, dan perangkat desa lainnya saling berkoordinasi untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan pembinaan sikap kepedulian terhadap lingkungan, pembinaan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha ternak sapi, dan pembinaan pengetahuan pada proses pengambilan keputusan melalui musyawarah desa.

Adapun hasil penelitian terkait dengan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala Desa bahwa saya selaku pimpinan di Desa Oluhuta ini selalu memberikan pembinaan peduli lingkungan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempat sampah. Selain itu juga, saya memberikan peluang dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha ternak sapi dan keterampilan dalam membangun berprofesi sebagai tukang. Pada pembinaan pengetahuan masyarakat, saya memberikan pembinaan pada proses pengambilan keputusan bersama terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan di Desa Oluhuta melalui musyawarah desa dengan memberikan kesempatan kepada semua masyarakat menyampaikan semua aspirasinya.

Untuk memperoleh informasi tentang upaya pembinaan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah desa, peneliti mewawancarai sekretaris desa yang menyatakan:

Dalam proses pembangunan desa sangat dibutuhkan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih bebas sampah.

Saya mewakili semua perangkat desa, telah menjalankan program bank sampah untuk disalurkan ke rumah-rumah penduduk sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dengan tetap menjaga lingkungan agar tetap bersih dan indah. Program tersebut sesuai dengan usulan masyarakat pada saat musyawarah desa yang dilaksanakan di aula desa. (Basrin Lakoro. *Wawancara*. Tanggal 20 Desember 2020).

Menjaga kebersihan lingkungan sangat dibutuhkan sosialisasi untuk seluruh masyarakat mengenai pelestarian lingkungan, agar masyarakat memiliki pengetahuan mengenai pelestarian lingkungan. Apabila masyarakat memiliki pengetahuan mengenai pelestarian lingkungan, maka masyarakat akan lebih peduli terhadap lingkungan yang terwujud dalam perilaku sehari-hari. Perilaku peduli lingkungan masyarakat akan lebih menunjang keamanan dan kenyamanan desa. (Hamran Ahaya. *Wawancara*, tanggal 20 Desember 2020)

Untuk mengkonfirmasi kebenaran dari pernyataan pemerintah desa terkait pembinaan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, peneliti mewawancarai Pani Higa sebagai warga masyarakat di Desa Oluhuta yang menyatakan:

Pemerintah desa selalu memberikan pembinaan kepada kami untuk menjaga kebersihan lingkungan serta melestarikan lingkungan yang ramah lingkungan. Pemerintah desa juga membagikan tempat sampah di semua rumah warga sebagai tempat penampungan sampah yang diletakan di depan rumah warga. (Pani Higa. *Wawancara*. Tanggal 20 Desember 2020).

Ditambahkan pula oleh Arzan Korompot yang menyatakan:

Kepala Desa dan segenap perangkat desa memberikan pembinaan untuk peduli terhadap lingkungan baik kebersihan rumah dan kebersihan lingkungan di desa untuk tetap bersih dari segala sampah. (Arzan Korompot. *Wawancara*. Tanggal 20 Desember 2020).

Terkait dengan upayapembinaan pemerintah desa terhadap pengembangan kemampuan dan keterampilan masyarakat, peneliti mewawancarai Fatma Ahaya yang menyatakan:

Pemerintah desa memberikan pembinaan kepada masyarakat untuk mengembangkan semua kemampuan dan keterampilan mereka masing-masing melalui program pembangunan dari anggaran desa dan belanja modal pada pembangunan rabat beton dan jamban keluarga. (Fatma Ahaya. *Wawancara*, tanggal 21 desember 2020)

Kemampuan dan keterampilan masyarakat dikembangkan dengan program pembangunan yang ada di desa dengan langsung memperkerjakan mereka sebagai tukang dengan bimbingan langsung dari pemerintah desa. (Ramang Moha. *Wawancara*, tanggal 23 Desember 2020).

Peneliti mewawancarai beberapa masyarakat untuk mengecek kebenaran tentang pembinaan pengembangan kemampuan masyarakat dalam membangun rabat beton di Desa Oluhuta sebagai berikut:

Hazrin Hulalata menyatakan:

Iya benar, saya salah satunya yang ikut bekerja dalam membuat rabat beton di Desa Oluhuta bersama rekan-rekan masyarakat lain. Pembangunan rabat beton juga sudah terselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah desa.(Hazrin Hulalata.*Wawancara*, tanggal 23 Desember 2020).

Pernyataan tersebut didukung oleh Haris Hula yang menyatakan:

Saya dan rekan kerja lainnya membuat rabat beton dalam jangka waktu 2 minggu dengan jumlah pekerja 15 orang salah satunya saya dipercayakan sebagai tukang dalam membangun rabat beton di Desa Oluhuta.(Haris Hula.*Wawancara*, tanggal 23 Desember 2020).

Berkaitan dengan informasi pembinaan pengambilan keputusan pada musyawarah desa, peneliti mewawancarai beberapa informan sebagai berikut:

Susiyati Manti menyatakan:

Kami melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait proses pengambilan keputusan melalui musyawarah desa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan semua aspirasi dan usulan mereka terkait dengan program pembangunan yang belum dilakukan di desa untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi anggaran desa pada tahun berikutnya melalui musyawarah desa. (Susiyati Manti. *Wawancara*, tanggal 23 desember 2020).

Ditambahkan pula oleh ketua BPD yang menyatakan:

Pengambilan keputusan setiap rencana kerja dan program desa selalu dibahas dalam musyawarah desa yang setiap tahunnya dilaksanakan 5 sampai 6 kali guna untuk mengumpulkan semua usulan dari masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai tambahan rencana pembangunan desa. Pemerintah desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa dengan mempersiapkan bahan pembahasan yang bersifat strategis yang telah dirumuskan oleh BPD. Bahan pembahasan disusun dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku, kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kondisi obyektif desa dan aspirasi masyarakat. (Masrun Ahmad. *Wawancara*, tanggal 23 desember 2020).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Salam Gobel yang menyatakan:

Saya dan masyarakat lainnya sering menghadiri musyawarah desa melalui undangan ketua dusun. Dalam musyawarah tersebut membahas proses pengambilan keputusan tentang rencana kerja pembangunan di desa. Sebagian kecil masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut. (Salam Gobel. *Wawancara*, tanggal 23 desember 2020).

Hatim Monoarfa menyatakan:

Saya ikut dalam musyawarah tersebut. Dalam musyawarah itu dihadiri sebagian kecil masyarakat, aparat desa dan tokoh agama membahas tentang bagaimana langkah pengambilan keputusan untuk penyusunan rencana pelaksanaan pembangunan di desa. Kami diberikan kesempatan untuk memberikan semua usulan tentang perencanaan pembangunan. (Hatim Monoarfa. *Wawancara*, tanggal 23 desember 2020).

Rencana diselenggarakannya musyawarah desa yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna, keterwakilan kelompok perempuan, orang miskin, serta warga yang berpartisipasi.

Hal ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan musyawarah lebih trasnparan dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat Desa Oluhuta.

Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, pemerintah desa melakukan pembinaan sikap kepedulian lingkungan yang ramah lingkungan bebas dari sampah, pembinaan kemampuan masyarakat dalam menbangun desa serta pembinaan proses pengambilan keputusan melalui musyawarah desa yang dihadiri semua aparat desa, sebagian kecil masyarakat dan tokoh agama yang membahas tentang perencanaan pembangunan desa

2) Pelibatan Masyarakat Dalam Pembangunan

Pemerintah desa telah berupaya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan di desa dengan membuat rabat beton sepanjang 300 meter dan jamban keluarga bagi masyarakat yang belum mempunyai jamban. Hal tersebut dilakukan pemerintah desa untuk pengembangan kemampuan masyarakat serta meminimalisir angka pengangguran dikalangan masyarakat.

Hasil penelitian peneliti menunjukkan perlibatan masyarakat dalam pembangunan desa sudah cukup baik dalam hal pembangunan infrastruktur fisik seperti pembangunan rabat beton, jamban keluarga, dan pembangunan non fisik seperti pelestarian lingkungan dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat dalam penentuan keputusan rencana pembangunan desa.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan terkait keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa yaitu sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala Desa terkait keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa Oluhuta sebagai berikut.

Masyarakat turut serta dalam membangun rabat beton dan jamban keluarga yang diikuti oleh beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai tukang dengan berbagai macam keahlian dalam bidang bangunan, serta turut serta dalam memberikan masukan dan usulan dalam penentuan rencana pembangunan melalui musyawarah desa. (Hamran Ahaya. *Wawancara*, tanggal 25 desember 2020).

Salam Gobel menyatakan:

Saya dan masyarakat lainnya ikut terlibat dalam membuat rabat beton dan jamban di desa Oluhuta. Kami membuat rabat beton dan jamban keluarga disemua dusun sesuai dengan program pembangunan yang telah menjadi rencana desa. (Salam Gobel. *Wawancara*, tanggal 25 desember 2020).

Strategi dasar yang dilakukan dalam pembuatan kebijakan adalah pembangunan yang diarahkan seminimal mungkin agar tidak terjadinya kesenjangan antara lain dengan mengurangi jumlah pengangguran yang ada selain strategi dasar tersebut maka perlu adanya strategi pendukung dalam mengatasi masalah pembangunan desa yaitu dengan pembangunan infrastruktur serta pelibatan masyarakat dalam pembangunan.

Ditambahkan oleh Sekretaris Desa yang menyatakan:

Masyarakat dilibatkan dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan bekerja sama membersihkan halam mesjid, kantor desa, dan lingkungan desa melalui program jumat bersih bersama-sama dengan semua aparat desa. (Basrin Lakoro. *Wawancara*, tanggal 25 desember 2020).

Pernyataan tersebut didukung oleh Herman Hula yang menyatakan:

Setiap hari jumat di desa oluhuta melakukan kerja bakti yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah desa untuk membersihkan halaman mesjid, kantor desa dan lingkungan desa. (Herman Hula. *Wawancara*, tanggal 25 desember 2020).

Pembangunan di Desa diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat. Dalam mengukur seberapa berhasilnya suatu pembangunan yang ada di desa dilihat dari terciptanya kerja sama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Pemerintah Desa melalui kerja sama dengan lembanga, tokoh-tokoh dan masyarakat untuk ikut serta dalam pelestarian lingkungan yang dilakukan secara gotong royong untuk membiasakan hidup bersih. Tujuannya agar masayarakat bisa sebagai pengontrol kualitas pembangunan dan terlibat langsung dalam pembangunan Desa.

Pada penentuan keputusan untuk pembangunan di desa, sebagian kecil masyarakat ikut terlibat dengan memberikan aspirasi dan usulan serta ide dan gagasan terkait pembangunan desa melalui musyawarah desa. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa baik itu infrastruktur fisik maupun non fisik. (Susiyanti Manti. *Wawancara*. Tanggal 25 Desember 2020). Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala desa yang menyatakan:

Tidak semua masyarakat yang ikut dalam musyawarah proses pengambilan keputusan dengan memberikan usulan dan ide program pembangunan desa. Dalam pertemuan tersebut diputuskan terdapat beberapa pembangunan yang paling banyak diusulkan yakni pembangunan rabat beton dan jamban keluarga. (Hamran Ahaya. *Wawancara*, tanggal 25 desember 2020).

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan serta di dalam kehidupan publik lokal. Kebanyakan intervensi atau campur tangan mereka yang bersifat khusus hanya menyangkut pemakaian pelayanan tertentu. Intervensi mereka diharapkan bisa terlaksana dalam jangka waktu yang singkat, hemat biaya

bagi yang bersangkutan, dan dapat segera direspon oleh penyedia jasa yang terkait. Dengan kata lain, keterlibatan warga itu cenderung secara langsung menyentuh materi yang berkaitan dengan kepentingan setiap individu.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan pemerintah desa telah berupaya melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa melalui perlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pembangunan rabat beton, dan pembangunan jamban keluarga. Namun tidak semua masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa.

4.1.3 Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara

1) Faktor Pendukung

Hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa faktor pendukung yang dimiliki Pemerintah Desa Oluhuta untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunadesa adalah keterbukaan dan komitmen pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat, dan ketersediaan dana. Sedangkan faktor pendukung yang dimiliki masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan adalahmasihkuatnya sikap sosial atau kegotongroyongan masyarakat, keswadayaan, kemandirian, dan tingkat pendidikan masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan Kepala Desa yang menyatakan:

Keterbukaan dan komitmen pemerintah desa Oluhuta untuk selalu melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan yang kemudian membentuk mental masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan pembangunan seperti kemandirian, kepercayaan diri, dan kesukarelaan berkorban dalam pembangunan.Tingkat pendidikan juga sangat mempengaruhi pola fikir masyarakat.Selain itu juga kecukupan dana atau

keuangan desa yang menjadi pendukung dalam menggerakkan masyarakatnya melalui kegiatan-kegiatan kelembagaan. Sumber biaya yang dapat digunakan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan desa didapat dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), dan swadaya masyarakat Desa. (Hamran Ahaya. *Wawancara*, tanggal 25 desember 2020).

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa bahwa yang menjadi faktor pendukung mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu keterbukaan dan komitmen pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat untuk bersama-sama membangun desa. Hal tersebut masih terlihat sampai sekarang sesuai dari visi dan misinya. Pemerintah Desa Oluhuta dalam salah satu misinya ingin meningkatkan pengalaman kehidupan beragama, meningkatkan keamanan, ketertiban, dan kesehatan masyarakatnya melalui penataan lingkungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi/bergotong royong. Basrin Lakoro. *Wawancara*, tanggal 26 desember 2020).

Ditambahkan pula Kasi Pemerintahan dan Pembinaan yang menyatakan:

Tingkat pendidikan masyarakat juga sangat mendukung upaya pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk membangun desa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat akan semakin baik pola fikirnya untuk berpikir kritis terhadap arah pembangunan desa. (Fatma Ahaya. *Wawancara*, tanggal 25 desember 2020)

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, dari total jumlah penduduk yang ada yakni 621 penduduk, lebih dari setengahnya yakni 347 penduduk berpendidikan SMA. Kondisi tersebut tentu sangat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka daya kritis masyarakat juga akan meningkat yang selanjutnya juga akan dapat meningkatkan pertisipasi masyarakat dalam

pembangunan. Karena selain itu, tingkat pendidikan masyarakat pada akhirnya juga turut berperan dalam meningkatnya tingkat penghasilan masyarakat.

Faktor pendukung usaha pemerintah mendorong partisipasi masyarakat Desa Oluhuta dalam pembangunan desa yaitu sikap sosial atau kegotongroyongan masyarakat yang tinggi sehingga mudah untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Namun, dalam perlibatannya tidak semua masyarakat yang ikut terlibat, hanya sebagian kecil masyarakat yang ikut terlibat dalam pembangunan desa. (Elmi Van Gobel. *Wawancara*, tanggal 25 desember 2020).

Kepala Dusun menyatakan:

Sikap gotongrong masyarakat sangat mendukung pembangunan di desa. Namun yang terlibat dalam pembangunan di desa tidak semua masyarakat yang hadir. (Agusalim Nakoda. *Wawancara*, tanggal 25 desember 2020).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan yang menjadi pendukung dalam upaya pemerintah desa Oluhuta mendorong partisipasi masyarakat membangun desa didukung komitmen pemerintah desa Oluhuta sendiri dalam melibatkan masyarakatnya untuk berperan dalam pembangunan desa, sikap gotongroyong yang dimiliki masyarakat, dan tingkat pendidikan masyarakat.

2) Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang selama ini dihadapi Pemerintah Desa Oluhuta dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah yang berasal dari dalam Pemerintah Desa Oluhuta dan yang berasal dari masyarakat. Dari dalam Pemerintah Desa Oluhuta, yakni lambatnya pembukuan atas pelaporan penggunaan APBDesa, sehingga membuat Pemerintah Desa Oluhuta menjadi lambat dalam

mengeksekusi program pembangunan, termasuk di dalamnya juga untuk menggerakkan masyarakat. Sedangkan faktor hambatan dari dalam masyarakat Desa Oluhuta sendiri adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga sering berlaku apatis atau masah bodoh dalam urusan di desa sehingga dapat menghambat proses-proses selanjutnya. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang sering meremehkan atau tidak menganggap penting pembangunan desa juga membuat Pemerintah Desa Oluhuta kesulitan dalam hal melaksanakan program pembangunan di desa. Sebagaimana yang dikatakan Kepala Desa yaitu:

yang menghambat upaya kami sebagai pemerintah desa Oluhuta yakni keterlambatan pembukuan pelaporan penggunaan keuangan desa yang mengakibatkan lambatnya pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, masyarakat juga sebagian besar berlaku masah bodoh, tidak menghiraukan pembangunan di desa bahkan meremehkan pelaksanaan pembangunan desa, sehingga membuat upaya pemerintah tidak terlaksana dengan baik. Karena sekecil apapun kontribusi dari masyarakat, apalagi yang berbentuk dana dan dapat dinilai dengan rupiah harus dicatat secara rinci agar dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. (Hamran Ahaya. *Wawancara*, tanggal 25 desember 2020).

Hambatan yang sering dijumpai dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa berasal dari masyarakat yang bersikap acuh tak acuh terhadap pembangunan di desa. Sebagian besar masyarakat berpandangan pelaksanaan pembangunan di desa tidak penting bagi mereka sehingga membuat mereka tidak ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. (Basrin Lakoro. *Wawancara*, tanggal 26 desember 2020).

Susiyati Manti selaku Kaur Keuangan dan Perencanaan menyatakan:

Penghambat dalam upaya mendorong masyarakat ikut serta dalam pembangunan desa yakni perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap perkembangan pembangunan di desa serta keterlambatan

pembukuan keuangan desa untuk membiayai pelaksanaan pembangunan merupakan penghambat yang utama.Oleh karena itu, upaya dan usaha pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat menjadi terhambat. (Susiyati Manti. *Wawancara*.Tanggal 26 Desember 2020).

Kelancaran keuangan desa untuk membiayai pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu jalan untuk membiayai proses perlibatan masyarakat ikut serta dalam pembangunan. Selain itu juga kepedulian masyarakat dalam pembangunan desa sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di desa.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat upaya pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yakni faktor keterlambatan pembukuan pelaporan keuangan desa untuk pembiayaan pembangunan desa serta ketidakpedulian masyarakat terhadap urusan pembangunan di desa.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta

1) Pembinaan Masyarakat Desa Oluhuta

Pembinaan yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat yakni pembinaan sikap masyarakat yang peduli lingkungan.Selain itu juga, pemerintah desa memberikan peluang dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha ternak sapi dan keterampilan dalam membangun berprofesi sebagai tukang. Pada pembinaan pengetahuan masyarakat, pemerintah desa memberikan pembinaan proses pengambilan keputusan rencana dan pelaksanaan pembangunan di Desa Oluhuta

melalui musyawarah desa dengan memberikan kesempatan kepada semua masyarakat menyampaikan semua aspirasinya.

Dalam pengambilan keputusan hanya terfokus pada beberapa orang saja yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penentuan kebijakan. Pengambilan keputusan terkonsentrasi di tangan segelintir orang atau kelompok. Menurut model ini, pembuatan keputusan adalah proses yang dilaksanakan demi keuntungan elite-elite tersebut. Tujuan elitisme didasarkan pada analisis terhadap cara dunia rill berjalan. Bahwa dalam dunia ril ada pihak-pihak yang berada di atas yang memegang kekuasaan dan ada “massa” yang tak memegang kekuasaan. (wayne Parsons, 2008:247).

Peneliti membandingkan antara data yang diperoleh dari lapangan dengan teori pembuatan keputusan bahwa, model keputusan tingkat desa di Desa Oluhuta tergolong model elitis, dimana kekuasaan hanya terkonsentrasi di tangan segelintir orang atau kelompok.Hal ini dilihat daripemerintahan yang ada di desa Oluhuta masih menggunakan sistem lama, dimana berjalannya musyawarah desa, masih menunggu perintah dari Kepala Desa. Peraturan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan Bahwa, BPD menjadi titik focus dari hal-hal yang bersangkutan dalam berjalannya musyawarah hingga terealisasikannya hasil musyawarah yang ada di desa. Dalam undang-undang tertulis dengan jelas bahwa BPD sebagai wadah aspirasi masyarakat, dan BPD yang merumuskan serta membuat bahan musyawarah yang didiskusikan dengan Kepala Desa serta BPD. Hal ini berbeda dengan yang ada di Desa

Oluhuta, BPD bergerak atau melakukan tugasnya setelah mendapatkan perintah dari Kepala Desa.

2) Perlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan

Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pembangunan di desa membuat rabat beton sepanjang 300 meter dan jamban keluarga bagi masyarakat yang belum mempunyai jamban.Hal tersebut dilakukan pemerintah desa untuk mendorong keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan Desa Oluhuta.Pemerintah desa juga melibatkan masyarakat dalam pengusulan rencana pembangunan di desa serta melibatkan masyarakat dalam melestarikan lingkungan desa dengan membersihkan lingkungan desa dari semua jenis sampah dan rumput melalui program jumat bersih yang diadakan setiap seminggu sekali.

Perlibatan masyarakat dalam pembangunan desa sangat penting dalam mewujudkan tujuan bersama menciptakan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.Oleh karena itu, pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan di desa baik itu fisik, maupun pembangunan non fisik.Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang pembangunan desa serta mengurangi angka pengangguran yang ada di desa Oluhuta dengan memperkerjakan masyarakat dalam pembangunan fisik dan non fisik di desa.

Pembangunan di desa Oluhuta bukan hanya melibatkan beberapa masyarakat saja akan tetapi seluruh masyarakat diharapkan untuk ikut terlibat dalam membangun desa. Namun, keterlibatan masyarakat hanya sebagian kecil saja yang ikut terlibat disebabkan kesibukan masyarakat yang tidak bisa

dinggalkan yang menyebabkan mereka tidak turut serta dalam pembangunan desa.

Strategi dasar yang dilakukan dalam pembuatan kebijakan adalah pembangunan yang diarahkan seminimal mungkin agar tidak terjadinya kesenjangan antara lain dengan mengurangi jumlah penganguran yang ada selain strategi dasar tersebut maka perluadanya strategi pendukung dalam mengatasi masalah pembangunan desa yaitudengan pembangunan infrastruktur serta pelibatan masyarakat dalam pembangunan.

Pemerintah Desa Oluhuta dan lembaga yang terkait termasuk masyarakat sebagai yang menjalankan roda pembangunan di Desa Oluhuta yang bertujuan menciptakan suatu keadaan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Maka pembangunan merupakan upaya yang dilakukan untuk membawa masyarakat kepada keadaan yang lebih maju, sejahtera dan mandiri.

Pemerintah Desa melalui kerja sama dengan lembaga, tokoh-tokoh dan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan yang dilakukan secara gotong royong untuk membangun infrastuktur yang ada di Desa Oluhuta, tujuannya agar masyarakat bisa sebagai pengontrol kualitas pembangunan dan terlibat langsung dalam pembangunan Desa.

4.2.2 Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara

- 1) Faktor Pendukung

Faktor pendukung Pemerintah Desa Oluhuta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah keterbukaan dan komitmen pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat, sikap sosial, dan tingkat pendidikan masyarakat. Sedangkan faktor pendukung yang dimiliki masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan adalah masih kuatnya modal sosial kegotongroyongan masyarakat, keswadayaan dan kemandirian, tingkat pendidikan masyarakat yang relativ tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Sjafrizal (2016) bahwa agar pembangunan daerah harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Oleh karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik, memerlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mewujudkan pembangunan desa yang baik dan berkelanjutan. Upaya pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat sangat tepat karena pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk itu sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Desa diberikan kewenang penuh untuk mengurus pemerintahan Desa.

2) Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang dihadapi pemerintah desa Oluhuta yakni kurangnya kecakapan aparat desa dalam pembukuan dan pencatatan pelaporan penggunaan keuangan desa yang mengakibatkan terhambatnya penyaluran

keuangan desa berimbang pada proses pembangunan desa yang merupakan langkah untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu juga, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan pembangunan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Hal inilah sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Rahardjo Adisasmita (2006: 135) bahwa “yang menjadi faktor penghambat dalam pembangunan desa salah satunya yaitu sikap acuh tak acuh, apatis dan tidak adanya keinginan untuk merubah keadaan tersebut.

Faktor lain yang menghambat upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa, yakni pendidikan yang masih rendah, hal ini mengakibatkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap proses pembangunan menjadi minim, Sarana dan Prasarana, faktor ini merupakan pendukung bagi terselenggaranya aktifitas Pemerintah Desa. Sarana dan prasarana yang harus cukupmemadai baik dari segi jumlahnya, dari segi kualitasnya dan praktis dari segi penggunaannya, syarat-syarat sarana dan prasarana semacam ini lah yang akan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa, Keuangan, faktor ini adalah tulang punggung bagi terselenggaranya aktifitas Pemerintah Desa. Salah satunya ciri dari daerah otonom adalah terletak pada kemampuan dalam bidang keuangan. Karena itu kemampuan keuangan ini akan sangat memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pembangunan desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitua) melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang proses pengambilan kebijakan dalam pembangunan, pengusulan rencana pembangunan melalui musyawarah desa, dan b) melibatkan masyarakat dalam pembangunan rabat beton sepanjang 300 meter, pembangunan jamban keluarga, dan melaksanakan program jumat bersih seminggu sekali.
- 2) Faktor pendukung dan penghambat upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu a) faktor pendukung upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yakni sikap kegotongroyongan masyarakat yang cukup baik, dan kemandirian masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. b) yang menjadi penghambat dalam upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat untuk membangun desa yakni kurangnya kerja sama antara pemerintah Desa dengan masyarakat, dan sikap apatis masyarakat yang tidak menghiraukan pembangunan Desa.

5.2 Saran

- 1) Pemerintah desa lebih meningkatkan lagi kerja sama dengan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di desa serta melakukan sosialisasi pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa.
- 2) Bagi masyarakat untuk lebih menumbuhkan sikap kepedulian terhadap pertumbuhan dan perkembangan desa untuk berpartisipasi dalam membangun desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Amirullah. 2015. *Manajemen Strategi Teori-Konsep-Kinerja*. Jakarta: Mitra wacana media.
- Arikunto Suharsimi, 2006 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Edward Samuel Finer. 2006. *Pemerintahan Komparatif*. Bandung: PT. Ghalia Indonesia.
- Finer, Samuel Edward. 2006. *Comparative Government*. Terjemahan. Ghalia Indonesia. Bandung.
- Gunawan Iman, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hernowo, Basah. 2004. *Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan*. Artikel Jurnal, Vol. 1, No. 1.
- Khairuddin. (1992). *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty.
- Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan: Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Makmur Syarif, 2008, *Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Efektifitas Organisasi: Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maleong J. Lexy. 2011 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2009. *Akuntansi Biaya*. Penerbit Aditya Media. Yogyakarta.
- Nasution, 1991. *Metode Research*, Bandung: JEMMARS.
- Ndraha, Talizidhu. 1987. *Metodologi Pembangunan*. Indonesia. Jakarta. PT Bina Aksara.
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Prastowo Andi. 2010. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press.

- Raharjo Adisasmita,. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Siagian Sondang P. 2001. *Peranan Staf dan Manajemen*. Penerbit CV. Gunung Agung. Jakarta.
- Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sumodiningrat. 2007. *Kajian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia*. Indonesia. Jakarta: Kompas.
- Surachmad Winarno, 2006. *Pengantar Ilmiah Dasar, Metode Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Sairin Sjafri, 2002. *Pembinaan Masyarakat Desa: Beberapa Alternatif Pendekatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Sapari Imam Asy'ari,. 1993. *Sosiologi Perkotaan dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Surianingrat Bayu, 2008. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syafiie Kencana Inu. 2008. *Ilmu Administrasi Publik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Tanzeh Ahmad, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wayne Parsons, 2008. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik analisis Kebijakan*. (Jakarta: Fajar Interpratama Offset.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Kepala Desa dan Aparat Desa

Nama :

Jabatan :

Alamat :

1. Bagaimana upaya bapak/ibu sebagai pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa?
2. Upaya apa yang bapak/ibu lakukan ?
3. Langkah-langkah apa yang bapak/ibu lakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa?
4. Apakah dalam membangun desa melibatkan masyarakat ?
5. Bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Oluhuta?
6. Apakah semua masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan ?
7. Apa saja pembangunan yang telah terlaksana di Desa Oluhuta?
8. Bagaimana pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di Desa Oluhuta?
9. Apa saja pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan di Desa Oluhuta?
10. Apakah terlaksana dengan baik ?
11. Apakah ada kedala atau hambatan yang bapak/ibu hadapi dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa Oluhuta?

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Tokoh Masyarakat

Nama :

Jabatan :

Alamat :

1. Apakah bapak/ibu dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan desa ?
2. Bagaimana pembinaan yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat di Desa Oluhuta ?
3. Apa saja pembinaan yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat di Desa Oluhuta ?
4. Apakah bapak/ibu ikut serta dalam pembangunan desa Oluhuta ?
5. Apa saja yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam membangun desa?
6. Apa saja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di Desa Oluhuta ?

Dokumentasi penilitian



Wawancara dengan Bapak Hamran Ahaya

(Kepala Desa Oluhuta)



Wawancara dengan Bapak Basrin Lakoro

(Sekertaris Desa Oluhuta)



Wawancara dengan bapak Masrun Ahmad

(Ketua BPD Desa Oluhuta)



Wawancara dengan Bapak Agusalim Nakoda

(Kepala Dusun Desa Oluhuta)



Wawancara dengan Ibu Elmí Van Gobel

(Kasi Kesejatran dan Pemberdayaan)



Wawancara dengan Ibu Susiyanti Manti S.Pd

(Kaur Keuangan dan Perencanaan)



Wawancara dengan Bapak Hazrin Hulalata

(Tokoh masyarakat)



Wawancara dengan Bapak Pani Higa

(Tokoh Masyarakat)



Wawancara dengan Ibu Hatim Monoarfa

(Tokoh Masyarakat)

Usaha Ternak Sapi

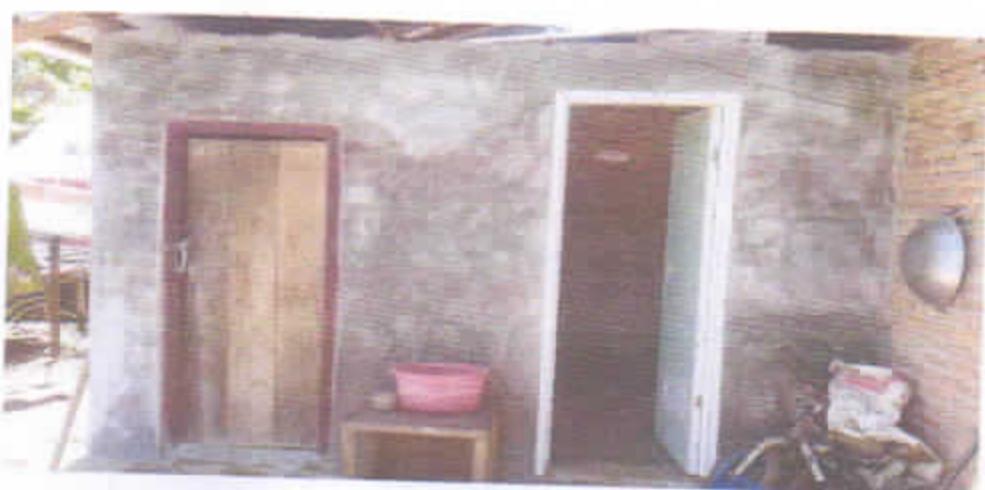
Di Desa Oluhuta Kec. Atinggola



Pembuatan Jamban Keluarga

Di Dua Dusun, Dusun Harapan dan Idaman

Di Desa Oluhuta Kec. Atinggola



Pembuatan Jalan Rabat Beton 300m

Di Desa Oluhuta Dusun Harapan Kec.Atinggola





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2348/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Oluhuta

di,-

Kab. Gorontalo Utara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Riyanti Samaun
NIM : S2117064
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Desa Oluhuta, Kab. Gorontalo Utara
Judul Penelitian : UPAYA PEMERINTAH DESA MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA OLUHUTA KECAMATAN ATINGGOLA KABUPATEN GORONTALO UTARA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
KECAMATAN ATINGGOLA
DESA OLUHUTA

Jln. Trans Sulawesi Nomor .. Desa Oluhuta Kec.Atinggola KP. 96253

Nomor : 145/DO-ATG/25/ II /2021
Sifat : -
Lamp. : -
Perihal : **SURAT BALASAN**

Oluhuta, 08 Februari 2021
Kepada Yth.
Ketua Lembaga Penelitian
Di –
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kab. Gorontalo Utara menerangkan kepada :

Nama	:	RIYANTI SAMAUN
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Nim	:	S2117064
Fakultas	:	Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan

Bahwa nama tersebut diatas benar – benar telah melakukan Penelitian di Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, dengan Judul: "UPAYA PEMERINTAH DESA MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA OLUHUTA KECAMATAN ATINGGOLA KABUPATEN GORONTALO UTARA".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Oluhuta, 08 Februari 2021
KEPALA DESA OLUHUTA


HAMRAN AHAYA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0026/UNISAN-G/S-BP/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : RIYANTI SAMAUN
NIM : S2117064
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : UPAYA PEMERINTAH DESA MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA OLUHUTA KECAMATAN ATINGGOLA KABUPATEN GORONTALO UTARA

Sejauh dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 31%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 12 Maret 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



S2117064_RIYANTI SAMAUN_UPAYA PEMERINTAH DESA MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA OLUHUTA KEC. ATING...

Mar 8, 2021

11484 words / 77814 characters

S2117064

SKRIPSI_S2117064_RIYANTI SAMAUN_UPAYA PEMERINTAH DE...

Sources Overview

31%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.uin-suska.ac.id INTERNET	6%
2	journal.uwgm.ac.id INTERNET	3%
3	digilib.uinsby.ac.id INTERNET	3%
4	muhammadalisehhabandi.blogspot.com INTERNET	2%
5	eprints.umpo.ac.id INTERNET	2%
6	repo.apmd.ac.id INTERNET	2%
7	digilib.uin-suka.ac.id INTERNET	1%
8	www.scribd.com INTERNET	1%
9	digilib.unila.ac.id INTERNET	1%
10	repository.usu.ac.id INTERNET	1%
11	eprints.umsida.ac.id INTERNET	<1%
12	text-id.123dok.com INTERNET	<1%
13	repository.uinjambi.ac.id INTERNET	<1%
14	repository.unhas.ac.id INTERNET	<1%
15	etheses.uin-malang.ac.id INTERNET	<1%
16	www.karanganyar.desa.id INTERNET	<1%

17	id.123dok.com	INTERNET	<1%
18	fexdoc.com	INTERNET	<1%
19	www.materibelajar.id	INTERNET	<1%
20	docobook.com	INTERNET	<1%
21	eprints.undip.ac.id	INTERNET	<1%
22	journal.iisngorontalo.ac.id	INTERNET	<1%
23	gdyassasuriawan.blogspot.com	INTERNET	<1%
24	www.slideshare.net	INTERNET	<1%
25	eprints.uny.ac.id	INTERNET	<1%
26	pal.iisngorontalo.ac.id	INTERNET	<1%
27	repository.iainpurwokerto.ac.id	INTERNET	<1%
28	ejurnal.unisri.ac.id	INTERNET	<1%
29	jonsult.unismuhluwuk.ac.id	INTERNET	<1%
30	pt.scribd.com	INTERNET	<1%
31	core.ac.uk	INTERNET	<1%
32	ejournal.unesa.ac.id	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None

ABSTRACT

RIYANTI SAMAUN. S2117064. THE EFFORTS OF THE VILLAGE GOVERNMENT TO ENHANCE COMMUNITY PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT OF OLUHUTA VILLAGE AT ATINGGOLA SUBDISTRICT IN NORTH GORONTALO DISTRICT

This study aims to find out the village government efforts to encourage community participation in the development of Oluhuta Village at Atinggola Subdistrict in North Gorontalo District and to investigate the supporting and inhibiting factors of the village government efforts to encourage community participation in the development of Oluhuta Village at Atinggola Subdistrict in North Gorontalo District. This study uses a qualitative method. The data collection employs observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses data collection, data reduction, data display, and conclusions. The results of this study indicate that the efforts of the village government to encourage community participation in village development are: 1) providing guidance to the community regarding environmental concern by keeping the environment clean from rubbish, 2) building community capacity in developing cattle production from the village government, and 3) fostering the decision-making process through village meetings. The supporting and inhibiting factors to the efforts of the village government to encourage community participation in village development, namely: 1) the supporting factors to the efforts of the village government to encourage community participation in village development are namely the openness and the commitment of the village government in involving the community in the development and the attitude of community cooperation in the development activities, and the level of relatively high community education, 2) the inhibiting factors to the efforts of the village government to encourage community participation in the development of the village come from the government itself, which is not capable of accounting for reporting the use of village finances so that village development financing is obstructed, and the ignorance attitude of the community in viewing the village development is not important, so in the implementation of development in Oluhuta Village most of the community does not participate in the development.

Keywords: government efforts, community participation, village development



ABSTRAK

RIYANTI SAMAUN. S2117064. UPAYA PEMERINTAH DESA MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA OLUHUTA KECAMATAN ATINGGOLA KABUPATEN GORONTALO UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu: 1) melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang kepedulian terhadap lingkungan dengan menjaga lingkungan tetap bersih dari sampah, 2) pembinaan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha ternak sapi dari pemerintah desa, dan 3) pembinaan proses pengambilan keputusan melalui musyawarah desa. Faktor pendukung dan penghambat upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu: 1) faktor pendukung upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yakni sikap keterbukaan dan komitmen pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat dalam pembangunan serta sikap gotongroyong masyarakat dalam kegiatan pembangunan, dan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif tinggi, 2) yang menjadi penghambat dalam upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat untuk membangun desa berasal dari pemerintah sendiri yang kurang cakap dalam pembukuan pelaporan penggunaan keuangan desa sehingga terhambatnya pembiayaan pembangunan desa, dan sikap masyarakat yang bersikap masa bodoh yang memandang pelaksanaan pembangunan desa merupakan hal yang tidak penting, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Oluhuta sebagian besar masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut.

Kata kunci: upaya pemerintah, partisipasi masyarakat, pembangunan desa



RIWAYAT HIDUP

IdentitasPribadi :

Nama Lengkap : Riyanti Samaun



Nama Pangilan : Raty

Nim : S2117064

Tempat/tanggal lahir : Kotajin, 10 November 1999

Angkatan : 2017

Agama : Islam

JenisKelamin : Perempuan

Status : Mahasiswa

AnggotaKeluarga :

1. Nama Ayah : Samaudin Samaun

2. NamaIbu : Maesa Ahmad

3. NamaKakak : 1. Pirsa Samaun

2. Farman Samaun